

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan, Cet. Pertama*. Identitas. Makassar.
- , 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Phinatama Media. Makassar.
- A. Rahman Zainuddin. 1999. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- C.S.T Kansil Chirstine Kansil. 2010. *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- H.A Masyhur Efendi. 1994. *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hardiman F Budi. 2011. *Hak-hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Kanisius. Jakarta.
- Joko J Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Jhonny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* Cet. Ketiga. Bayumedia Publishing. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-undang*. Rajawali Press. Jakarta.

- Luki Sandra Amali dkk. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Miriam Budiarto. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi revisi)*. Cet. Ke-9. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moh Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Gama Media. Jakarta.
- . 2016. *Politik Hukum Di Indonesia* Cet. Ketiga. PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muladi, dkk. 2009. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT. Rafika Aditama. Jakarta.
- Nomensen Sinamon. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Peter Marzuki Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum (Edisi Pertama)*. Kencana. Jakarta.
- P Samuel Huntington Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rhineka Cipta. Jakarta.

Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2007. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Cetakan Pertama*. Nuansa Cendikia. Bandung.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara Cetakan Kedua Belas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

R. Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Ed. Pertama*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Soerjono Seokanto. 1990. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.

Slamet Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara, (Edisi Revisi) Cet. Kesepuluh*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Tjahjo Kumolo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. PT. Mizan Republika. Jakarta.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Kamus

Bagus, Lorent. 2002. *Kamus Filsafat*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Garner, A. Bryan. *Black's Law Dictionary*. United State of America: Thomson West.

M Marwan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum: Dictionary of Law, Complete Ed.* Reality Publisher. Surabaya.

Prajogo, Soesilo. *Kamus Hukum Internasional & Indonesia.* WiPress Wacana Intelektual. Jakarta.

Tim Pustaka Phoenix. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. Baru,* PT. Media Pustaka Phoenix. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.* Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2002. *Undang-undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Amandemen Ke-empat.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2005. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Covenant on Civil and Political Rights (kovenan hak sipil dan hak politik).* Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.* Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.* Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet (Berita, Salinan Putusan, Jurnal)

- Giri Hartomo,
<https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/320/2038082/jumlah-pns-di-indonesia-capai-4-1-juta-pegawai> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 Pukul 08:21)
- Idil Akbar, *Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia* dalam jurnal
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/15953/11865> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2018 Pukul 21:07)
- Jamal Wiwoho, <http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2012/11/1.-KONSEP-DASAR-PENELITIAN-home.pdf> (diakses pada tanggal 8 Agustus 2018 Pukul 21:03)
- Muhammad Tafiqurrahman, <https://news.detik.com/berita/4081422/dirjen-otda-pecat-125-asn-yang-tak-netral-di-pilkada-2018> (diakses pada tgl 1 Agustus 2018, Pukul 13:49)
- Tommy Kurnia, <https://www.liputan6.com/tekno/read/3551916/3-kasus-pns-kena-sanksi-akibat-kelakuan-di-media-sosial> (diakses pada 10 juli 2018, Pukul 13:33)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18489/node/lt5209bc b9243ab/putusan-mk-no-011-017_puu-i_2003-pengujian-undang-undang-nomor-12-tahun-2003-tentang-pemilihan-umum-anggota-dewan-perwakilan-rakyat,-dewan-perwakilan-daerah,-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah (diakses pada tanggal 30 Juli 2018 Pukul 15:30)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56d55cf76bc4b/node/lt53b27d9b4702c/putusan-mk-no-41_puu-xii_2014-pengujian-undang-undang-nomor-5-tahun-2014-tentang-aparatur-sipil-negara-terhadap-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945 (diakses pada tanggal 10 Juli 2018 Pukul 12:56)